

PERILAKU TIDAK MEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 DI KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA

Oleh : Kevin K

Email : Khairulkevin@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Abstract

The characteristic of a democratic country is how much the state engages the community in planning and carrying out general elections because political participation of the community (voters) is an important aspect in a democratic state order, there is a phenomenon in the Tanjungpinang Kota Kelurahan, namely the level of participation or the percentage of pilkada from the Riau Islands KPU recapitulation data there is a low level of participation in tanjung pinang urban village that is only 41.95% considering tanjung pinang urban village is an urban community area that has a high level of education with prosperous employment status should be able to provide higher political participation results but vice versa

In this study there are two main concepts, namely; voting behavior and non-voting behavior that divides four factors, namely Socio-Economic Factors, Psychological Factors, Rational and Structural Factors as a result of research that the author has done in the graduation of Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Subdistricts, by spreading koesioner in 100 respondents.

Causes of Tanjungpinang Urban Village Community Not Voting in the Election of Mayor and Deputy Mayor of Tanjungpinang 2018 there are several main causes, namely voters domiciled outside the area, then the theory of non-voting or non-voting behavior theory is the rationalist and psychological factors which are the main factors of the community not voting in election of mayor and deputy mayor of Tanjungpinang in 2018 in Tanjungpinang Kota Sub-District, Tanjungpinang Kota Sub-District.

Keywords: *Non-voting behavior, political participation.*

Latar Belakang

Ciri sebuah Negara Demokrasi adalah seberapa besar Negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara Demokrasi

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang

di mana pada Pasal 41 Ayat ke 3 menyatakan masyarakat daerah persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh daerah persiapan¹, dan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur,

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

wakil gubernur, walikota dan wakil walikota menjadi undang-undang, yang diantaranya pasal 133A

pemerintahan daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan berdemokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.² Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih

Yang menarik dalam penelitian ini terdapat status pendidikan yang tinggi dan status pekerjaan yang ada tetapi masih kedapatan banyaknya jumlah masyarakat kelurahan Tanjungpinang Kota yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang yaitu sebanyak 2,933 suara ini bukanlah jumlah yang sedikit mengingat jumlah ini melebihi dari pada masyarakat yang menggunakan hak suaranya, oleh karena jumlah yang banyak ini penulis merasa tertantang karena didalam 2,933 masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya terdapat berbagai macam paradigma pada pilkada, dan terdapat kalangan masyarakat yang berbeda pula. Oleh karena itu, perilaku memilih masyarakat kota dalam pemilihan ini menjadi permasalahan yang peneliti ambil karena peneliti ingin mengetahui mengapa masyarakat Kelurahan Tanjungpinang kota lebih memilih untuk tidak memilih dengan mengambil sikap golput pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang 2018.

Kerangka Berfikir

a. Teori Perilaku Memilih

Dalam kajian perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu; perilaku

memilih (*voting behavior*) dan perilaku tidak memilih (*non voting behavior*). David Moon mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan perilaku non-voting yaitu: pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih.³

Secara sederhana pendekatan ini menyatakan bahwa jika biaya yang dikeluarkan untuk tidak memilih lebih kecil dari keuntungan yang akan diperoleh maka orang akan cenderung untuk tidak memilih. Pendekatan kedua ini dijelaskan lebih jauh karena kesulitan penggunaannya. Berikut akan diuraikan secara singkat karakter sosial dan psikolog pemilih.

1. Karakteristik Sosial Ekonomi

Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku non-voting selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku non-voting tersebut. Namun, pada sisi lain variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur karakteristik pemilih non-voting itu sendiri.

Indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga Lazimnya, variabel status sosial ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan

² Undang-Undang No. 1 Tahun 2014

³ Samsul Bahri, Skripsi: "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran Ke Dua Di Kota Pekanbaru Tahun 2013" (pekanbaru: UNRI,2014),.Hlm.33

menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan berhubung dengan kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubung dengan ketidakhadiran pemilih.

2. Faktor Psikologis

Penjelasan non-voting dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Penjelasan ini melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran dan tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya. Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahir bahkan lebih bersifat keturunan dan muncul secara konsisten dalam setiap perilaku. Faktor lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri kepribadian ini adalah keefektifan personal, yaitu kemampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk memimpin lingkungan disekitarnya. Misalnya, seberapa jauh seseorang mampu memimpin teman teman sepermainan, organisasi-organisasi sosial, profesi atau okupasi dimana mereka bekerja, dan sebagainya. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh orientasi kepribadian memilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomie dan alienasi. Secara teoritis perasaan apatis

sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan politik atau adanya perasaan bahwa aktifitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung.

Michael Rush memberikan pendapatnya mengenai partisipasi politik bahwa Orang-orang yang tidak ikut dalam politik mendapat julukan, seperti Apatitis, Sinisme, Alienasi, Anomie.⁴

1. Apatitis (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala

2. Sinisme menurut Agger diartikan sebagai “kecurigaan yang busuk dari manusia”. Dalam hal ini dia menilai bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi politik dalam bentuk apapun sia-sia dan tidak ada hasilnya.

3. Alienasi merujuk pada perasaan tidak berguna. Menurut Lane sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain tidak adil.

4. Anomie, yang oleh Lane diungkapkan sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu mengalami perasaan ketidak efektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan

⁴ Prof. Dr. Damsar, *Pengantar sosiologi politik*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hal. 153

devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

3. Faktor Pilihan Rasional

Secara teoritik Pilihan rasional bersandar pada hasil karya dua ilmuwan besar yang menjadi landasan teori pilihan rasional. Yakni, Antoni Downs yang menghasilkan karya *An Economic Theory of Democracy* (1957) dan Mancul Olson yang menghasilkan karya *The Logic Of Collective Action* (1965). Keduanya menjadi pionir untuk studi-studi pilihan rasional. Teori pilihan rasional memandang bahwa individu pemilih bukan merupakan yang terdeterminasi dalam menentukan pilihannya karena faktor-faktor dari luar dirinya yang mempengaruhi arah pilihannya. Sebaliknya teori ini memandang individu pemilih sebagai seseorang yang secara sukarela atau bebas menentukan pilihannya berdasar pertimbangan yang menguntungkan dirinya, mereka hanya akan memilih jika memperoleh keuntungan dari pemilihan tersebut, sebaliknya apabila tidak memperoleh keuntungan maka pemilih cenderung tidak menggunakan hak suaranya. Dalam hal ini, Evans menyatakan bahwa teori pilihan rasional memfokuskan pada pemilih individual dan berupaya menjelaskan proses pengambilan keputusan untuk kandidat yang akan dipilih.

4. Faktor Struktural

Faktor yang menjadi pemicu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah diakibatkan persoalan teknis. Dalam hal ini, penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) yang amburadul memicu tingginya jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT sehingga mengugurkan hak mereka sebagai pemilih.

b. Partisipasi politik

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya yang berjudul partisipasi politik di negara-negara berkembang memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Menurut mereka partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi politik bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, ilegal atau legal, efektif atau tidak efektif.⁵

Ramlan Subakti menurutnya partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan.⁶

Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan negara. Kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota salah satu partai atau kelompok kepentingan dan sebagainya.⁷

⁵ Samuel P Huntington dan Joan Nelson.. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta : Rineka Cipta 1994).,Hlm.6

⁶ Ramlan Subakti.*Memahami Ilmu Politik*,(Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 2010).,Hlm.181

⁷ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)., Hal .367

Populasi dan Sampel

a. populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan di teliti.⁸ Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kelurahan Tanjungpinang Kota kecamatan Kota Tanjungpinang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang berjumlah 2.933 orang.

b. sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang di ambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang di anggap bisa mewakili populasi.⁹ Penelitian ini menggunakan teknik *sampling* yaitu random sampling atau sampel acak. Yang dimana penelitian ini mengambil dengan cara di undi, untuk kelurahan tanjung pinang kota yang memiliki 15 TPS peneliti mengambil 10 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap terbanyak kemudian dari 10 TPS peneliti mengambil 10 orang dari masing-masing TPS untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Kemudian jumlah sampel dapat di ketahui dengan menggunakan rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n= Sampel 1 = Konstanta

N= populasi e^2 = Tingkat error data

Dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10% maka dapat di peroleh sampel sebagai berikut :

⁸ Ibid.Hlm.145

⁹ Ibid.Hlm.150-153

$$n = \frac{2.933}{1 + 2.933(0,1)^2}$$

$$n = \frac{2.933}{1 + 29.33}$$

$$n = \frac{2.933}{30.33} \quad n = 97 = 97 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Jumlah populasi di kelurahan Tanjungpinang Kota sebanyak 2.933 orang (N), *margin error* (e) adalah 10% atau (0,1) maka (n) atau jumlah sampel yang di tentukan adalah 100 responden.

Penyebab Masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota Tidak Memilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018

Penyebab masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota tidak memilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang 2018 terdapat beberapa penyebab utama yaitu pemilih berdomisili ke luar daerah, kemudian teori non-voting atau teori prilaku tidak memilih yang membagi empat faktor yaitu faktor sosial ekonomi, faktor psikologis, faktor rasional dan stuktural sebagai hasil penelitian yang telah penulis lakukan di kelurahan Tanjungpinang Kota kecamatan Tanjungpinang Kota dengan cara menyebarkan koesioner pada 100 responden.

Pemilih Berdomisilli ke Luar Daerah

Banyaknya masyarakat kelurahan Tanjungpinang Kota yang migrasi ke luar daerah untuk bekerja, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bahkan ada juga yang ikut keluarga. Kondisi ini juga memicu rendahnya partisipasi karena adanya masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap justru mereka sedang tidak berdomisili

di kelurahan Tanjungpinang Kota. Sebagai salah satu kasus terjadi pada salah seorang mahasiswa asal kelurahan Tanjungpinang kota kecamatan Tanjungpinang yang sedang melanjutkan pendidikan studinya di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru yang bernama Indra Saputra yang mengaku tidak menggunakan hak memilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang. Berikut hasil wawancara peneliti pada tanggal 17 maret 2019 bersama narasumber:

“Saya sudah terdaftar untuk pemilihan itu di tahun 2015 dan saat itu saya sudah melanjutkan pendidikan di pekanbaru, dalam pemilihan presiden, gubernur, legislative, dan pemilihan walikota pun saya tidak pernah memilih karna keadaan sedang berada di pekanbaru, dan kalo cuma untuk milih anda juga pasti tau ongkos untuk balik Kepri udah berapa, saya aja pulang cuman pas lebaran”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi geografis juga menyebabkan terjadinya penurunan partisipasi pemilih terhadap pemilu, sebagian masyarakat kelurahan Tanjungpinang kota berstatus mahasiswa yang sedang studi di luar daerah dan sebagian juga migrasi dan sebagian juga keluar daerah untuk bekerja tentunya tidak dapat memilih di daerah domisil mereka, dengan kendala masalah administrasi peserta pemilih, dan masalah geografis tentunya.

Perilaku Non-Voting

Teori tentang perilaku tidak memilih masyarakat pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang di kelurahan Tanjungpinang Kota kecamatan Kota Tanjungpinang terdapat empat faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak memilih yaitu faktor rasional, faktor

psikologis, faktor sosial ekonomi dan faktor struktural.

1.Faktor Ekonomi

Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku non-voting selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku non-voting tersebut. Namun, pada sisi lain variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur karakteristik pemilih non-voting itu sendiri.

Indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga. Lazimnya, variabel status sosial ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan berhubungan dengan kehadiran memilih, itu berarti kesibukan masyarakat terutama pada kesehariannya bekerja menjadi faktor utama dalam karakteristik sosial ekonomi mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Sebagian besar masyarakat kelurahan Tanjungpinang kota tidak memilih bukan dikarenakan alasan berlibur. Tercatat dalam hasil olahan penelitian sebanyak 62% responden memilih beralasan libur sehingga tidak memilih dan 38% responden beralasan bekerja. Adapun dari hasil wawancara dengan masyarakat yang beralasan berlibur menjadi alasan mereka tidak memilih sebagai berikut. Sakriadi masyarakat kelurahan Tanjungpinang Kota RW 5 RT 2 tanggal 24 maret 2019

“saya bekerja di PT, untuk kerja ini memakai pembagian waktu dan saya setiap harinya dapat bagian kerja pagi sampai siang, jarang dapat libur karna di PT kita sistem kerja pakai kontrak, pas pilwako kemarin saya memutuskan untuk libur 1 hari dari rutinitas kerja dan lebih memilih nyantai dirumah.”

Dini masyarakat kelurahan Tanjungpinang kota Rw 4 Rt 1 tanggal 24 maret.

“waktu pilwako saya sama temen-temana kampus lebih memilih jalan-jalan karna juga udah janji”

Kemudian tanggapan lain datang dari wawancara peneliti bersama masyarakat yang beralasan karna bekerja mereka tidak ikut serta dalam pemilu, yaitu ; Amron masyarakat kelurahan Tanjungpinang Kota RW 10 RT 1 tanggal 20 Maret 2019.

“saya bekerja sebagai gochar jadi kalau sistem gochar ya ga pakek hari libur atau kerja tergantung kita aja, dan pas pilwako kemarin banyak jagan orderan antar jemput karna hari libur mungkin ya, jadi saya lebih memilih bekerja dan mengejar target orderan saya”

Dari kesimpulan wawancara penulis menyimpulkan untuk masyarakat yang tidak memilih dikarenakan berlibur, karna kebanyakan masyarakat yang tidak memilih hanya berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas biasanya seperti bekerja dan sebagainya, lain lagi masyarakat yang tidak memilih karna bekerja, mereka lebih melihat kepada peluang yang muncul di hari libur sehingga mereka tetap memilih untuk bekerja

2. Faktor Psikologis

Penjelasan non-voting dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Penjelasan ini melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya Untuk itu peneliti menyimpulkan semua pertanyaan tentang faktor psikologis dalam koisioner yang penulis berikan kepada responden,

Masyarakat kelurahan Tanjungpinang Kota dengan total 100 orang responden memilih pilihan kadang-kadang ikut serta dalam pemilu bearti dari hasil ini bisa di simpulkan bahwa masyarakat kelurahan Tanjungpinang Kota tidak apatis dengan kondisi pemilu tertentu, adapun dari hasil wawancara bersama masyarakat kelurahan Tanjungpinang Kota mengenai keikutsertaan dalam pemilu sebagai berikut.

Tio masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota Rw 05 Rt 02 tanggal 25 Maret 2019.

“untuk pemilu ya sesekali saya ikut seperti pilpres kemarin saya ikut, hanya mungkin pas pilwako tahun ini karna ada kesibukan saya jdi ga ikut”

Lusi masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota Rw 03 Rt 01 Tanggal 24 Maret 2019.

“pilwako tahun kemarin saya ikut pemilihan tapi yang tahun ini saya sudah ada janji sama temen karna libur”

Demikian dari hasil wawancara bersama responden kelurahan Tanjungpinang yang memilih pilihan jawaban koisioner kadang-kadang ikut serta dalam pemilu tapi tidak ikut serta dapat di

simpulkan bahwa masyarakat kelurahan Tanjungpinang Kota tidak apatis karna kadang ikut serta dalam pemilu.

3. Faktor Pilihan Rasional

Secara teoritik Pilihan rasional bersandar pada hasil karya dua ilmuwan besar yang menjadi landasan teori pilihan rasional Yakni, Antoni Downs yang menghasilkan karya *An Economic Theory of Democracy* (1957) dan Mancul Olson yang menghasilkan karya *The Logic Of Collective Action* (1965). Keduanya menjadi pionir untuk studi-studi pilihan rasional. Teori pilihan rasional memandang bahwa individu pemilih bukan merupakan yang terdeterminasi dalam menentukan pilihannya karena faktor-faktor dari luar dirinya yang mempengaruhi arah pilihannya.

Pertimbangan menentukan pilihan sebagian besar masyarakat kelurahan Tanjungpinang Kota memilih pilihan jawaban kadang menentukan pilihan berdasarkan untung-rugi. Berdasarkan data koesioner sebesar 68% responden memilih dengan kadang menentukan pilihan berdasarkan untung-rugi dan 32%nya lagi menentukan pilihannya dengan selalu berdasarkan untung-rugi. Adapun dari hasil wawancara dengan masyarakat yang kadang menentukan pilihan berdasarkan untung-rugi sebagai berikut. Shui Hiok warga Kelurahan Tanjungpinang Kota RW 02 RT 01 tanggal 22 Maret 2019

“kita lihat dulu kalo seperti calon pasangan tidak ada kontribusi untuk mendapatkan suara ya sudah ga usah milih, seperti pilwako kemarin ya saya pribadi tidak tertarik”

Dan kemudian adapun dari hasil wawancara dengan masyarakat yang selalu menentukan pilihan berdasarkan untung-rugi sebagai berikut. Tek Kuang warga

Kelurahan Tanjungpinang Kota RW 02 RT 02 tanggal 23 Maret 2019.

“dalam pilwako 2018 kemarin saya tidak memilih dikarenakan melihat calon dan wakil calon yang kurang sosialisasi di tempat-tempat perkotaan seperti kelurahan Tanjungpinang kota ini, oleh karena itu kita pun sebagai masyarakat tidak tau apa saja sarana dan prasarana yang akan di bangun dan di jalankan pemerintah kedepannya, dan melihat kinerja pemerintah yang dari tahun ke tahun sama saja untuk apa saya memilih bila tidak ada kemajuannya”

Hasil wawancara yang peneliti lakukan di kerurahan tanjungpinang kota dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menentukan pilihan dengan berdasarkan untung-rugi karna kepercayaan mereka terhadap pemerintahan yang terkesan sudah sangat memprihatinkan dan tidak membawa perubahan sama sekali terhadap Kota Tanjungpinang.

4. Faktor Struktural

Faktor yang menjadi pemicu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilukada diakibatkan persoalan teknis. Dalam hal ini, penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) yang amburadul memicu tingginya jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT sehingga mengugurkan hak mereka sebagai pemilih.

Kelurahan Tanjungpinang Kota mayoritas masyarakat tidak mengetahui bahwa dirinya terdaftar dalam daftar pemilih tetap kelurahan Tanjungpinang Kota tetapi tidak memilih dalam pilwako 2018. Menurut data presentase sebesar 83% masyarakat tidak mengetahui bahwa terdaftarnya di daftar pemilih tetap, lalu 17% masyarakat yang mengetahui bahwa terdaftarnya di daftar pemilih tetap tetapi tetap tidak

memilih. Adapun dari hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak mengetahui terdaftarnya di daftar pemilih tetap sebagai berikut. Sarina masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota RW 06 RT 01 tanggal 23 Maret 2019.

“saya kurang tau kalau soal terdaftarnya di DPT karna kebetulan saya bukan asli sini, di sini Cuma ikut suami awalnya tapi sudah 3 tahun saya menetap di sini, kemarin pas pilwako saya juga ga pergi ke TPS karna ada kesibukan rumah tangga”.

Dari kesimpulan wawancara masyarakat yang tidak mengetahui tentang informasi daftar pemilih tetap adalah masyarakat yang memang tidak pergi ke masing-masing TPS sehingga tidak mengetahui tentang informasi tersebut. Kemudian wawancara dengan masyarakat yang mengetahui terdaftarnya di daftar pemilih tetap sebagai berikut. Fedri masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota RW 08 RT 01 tanggal 25 Maret 2019.

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat yang sedang berdomisil di luar daerah tidak bisa memilih dikarenakan faktor geografis dan dalam keadaan bekerja, sehingga terpaksa harus golput pada pilwako 2018

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Penyebab Masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota Tidak Memilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2018 terdapat beberapa penyebab utama yaitu pemilih berdomisili ke luar daerah, kemudian dua dari ke empat faktor yaitu faktor rasional, faktor psikologis, faktor kepercayaan politik dan faktor sosial ekonomi sebagai hasil penelitian yang telah penulis lakukan di kelurahan tanjungpinang

kota kecamatan tanjungpinang kota dengan cara menyebarkan koesioner pada 100 responden.

1. Banyaknya masyarakat kelurahan tanjungpinang kota yang migrasi ke luar daerah untuk bekerja, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bahkan ada juga yang ikut keluarga. Kondisi ini juga memicu rendahnya partisipasi karena adanya masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap justru mereka sedang tidak berdomisili di kelurahan tanjungpinang kota.

2. hasil penelitian ini juga menunjukkan tingginya jumlah masyarakat yang tidak memilih karena faktor rasional yang masyarakat merasa tidak ada untungnya jika mereka memilih calon dan wakil calon walikota dan wakil walikota Tanjungpinang, dari jumlah kuesioner yang peneliti ajukan sebesar 100% memilih karna faktor rasional lah mereka lebih dominan tidak memilih.

3. hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwasannya faktor psikologis responden juga mempengaruhi minat untuk memilih dalam pemilu hal ini di buktikan dengan 66% dari 100% responden memilih tidak tertarik kepada politik sehingga tidak ikut memilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang 2018.

4. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak mempengaruhi masyarakat kelurahan Tanjungpinang kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang hal ini di buktikan dari 100% koesioner penelitian hanya 38% yang menjawab YA untuk faktor ekonomi.

5. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor strutural tidak

mempengaruhi masyarakat kelurahan Tanjungpinang kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang hal ini di buktikan dari 100% koesioner penelitian hanya 34% yang menjawab YA untuk faktor struktural.

Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi proses pemilihan kepala daerah di kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Kota Tanjungpinang di masa yang akan mendatang. Adapun saran-saran dari penulis yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pada saat pemilihan kepala daerah selanjutnya di harapkan pemerintah dapat mencari jalan keluar untuk pemilih yang berada di luar daerah sehingga tidak menyebabkan terjadinya golput karna faktor domisinil tersebut, terutama untuk putra-putri daerah yang sedang menjalankan pendidikan di luar daerah semoga kedepannya lebih terdata dengan kerjasama bersama ikatan mahasiswa atau sebagainya.
2. Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat kelurahan Tanjungpinang Kota sebaiknya panitia penyelenggara pilkada dapat memberikan kesan dan pesan terhadap berpolitik untuk masyarakat seperti misalnya memasang sepanduk kesadaran akan berpolitik yang sangat penting, dan sebagainya, sehingga membuat masyarakat sadar akan betapa pentingnya berpartisipasi politik.
3. Pada saat proses pilkada berlangsung, ada baiknya semua calon/kandidat kepala daerah memperkenalkan diri ke masyarakat dan sosialisasi yang merata

dengan cara yang tepat dan efektif sehingga masyarakat tau akan untung dan ruginya berpolitik, agar pemikiran masyarakat tentang politik bukan sekedar tentang nominal saja tapi tentang bagaimana membangun dan menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi dengan politik itu sendiri.

4. Bagi peneliti lainnya bisa melakukan penelitian lanjutan, diharapkan dapat lebih teliti lagi dalam mencari penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat kelurahan Tanjungpinang kota, karna diduga ada pengaruh dari variabel lain dari faktor-faktor yang penulis teliti terhadap perilaku memilih masyarakat kelurahan Tanjungpinang kota kecamatan Kota Tanjungpinang pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mobtar Mas'ood, Colin MacAndrew. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- A.Rahman H.I, 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Prof.Dr. Damsar, 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Samuel P Huntinton dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subakti, ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syafhendri. 2016. *Perilaku Pemerintahan Teori dan Praktek*, Pekanbaru: Alaf Riau.
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.

Skripsi

- Januardi Adlin, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik

Masyarakat pada Pilkades Serentak di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2015.

Julia Hafizatun Nisyak, Prilaku Memilih Masyarakat Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur pada Pemilukada 2015

Jurnal

Ade Aditia Armi. Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Putaran Pertama di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2013. JOM FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014

Samsul Bahri. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Putaran Pertama di Kecamatan Pekanbaru Tahun 2013. (Studi Kasus di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki). JOM FISIP Volume 2 No. 2 – Oktober 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014

Undang – Undang No. 1 Tahun 2014

Undang – Undang No. 5 Tahun 2001

Undang – Undang No. 25 Tahun 2002

Dokumen

Rekapitulasi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Kota di Kelurahan Tanjungpinang Kota Tahun 2018

Laporan Tahunan Kelurahan Tanjungpinang Kota 2017-2018